



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sebagian anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 sudah di mutasi dan purna tugas, sehingga perlu dilakukan perubahan anggota tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah

diubah ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

.....
Margareth Robin K



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 290 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAK NONFISIK DANA PELAYANAN PPA**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
1.	Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	Pengarah	Nasional
2.	Destri Handayani, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Penanggung Jawab Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran serta Pemantauan dan Evaluasi	Nasional
3.	Qurrota Ayun, Plt. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen	Penanggung Jawab Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran	Nasional



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
	PPN/Bappenas)		
4.	Fakih Usman, Inspektur, Kemen PPPA	Ketua Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi	Nasional
5.	Chrystianto Budi Mulyono, Plt. Kepala Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pendataan Kasus melalui SIMFONI PPA	Nasional
6.	Prijadi Santoso, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Penguatan Sumber Daya Manusia UPTD PPA	Pulau Jawa, Papua, Nusa Tenggara, Bali
7.	Eni Widiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Penguatan Sumber Daya Manusia UPTD PPA	Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
8.	Elvi Hendrani, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Penguatan Sumber Daya Manusia UPTD PPA	Pulau Jawa, Papua, Nusa Tenggara, Bali
9.	Ciput Eka Purwanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Penguatan Sumber Daya Manusia UPTD PPA	Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku
10.	Ratih Rachmawati, Plt. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pulau Jawa, Papua, Nusa Tenggara, Bali
11.	Atwirlany Ritonga, Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kemen PPPA	Ketua Pelaksanaan Layanan Korban Kekerasan terhadap Anak,	Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
		Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	
12.	Dwi Budi Prasetyo, Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran	Nasional
13.	Ferdy Ferdiansyah, Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran	Wilayah Indonesia Timur
14.	Yogi Catuma Perdana, Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran	Wilayah Indonesia Tengah
15.	R. A. Affandi Rahadian, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran	Wilayah Indonesia Barat
16.	Tria Rosalina Budi Rahayu, Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Pemantauan dan Evaluasi	Pulau Jawa, Papua, Nusa Tenggara, Bali
17.	Winda Febria Windi, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Wakil Ketua Pemantauan dan Evaluasi	Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku
18.	Nurhayati, Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Timur
19.	Anita Putri Bungsu, Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Tengah



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
20.	Novalia Fajri, Analisis Kepegawaian Ahli Muda, pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Timur
21.	Yeyep Mulyana, Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
22.	Marlina Moegijono Putri, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Timur
23.	Marlinah, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Tengah
24.	Vernanda Fairuz, Ahli Pertama Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
25.	Nazabiya, Analisis Perencanaan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Timur
26.	Dewi Sahara, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Tengah
27.	Indra Rahmadi, Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
28.	Desi Retnowati, Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro	Anggota	Wilayah Indonesia Timur



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
	Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA		
29.	Gizela Giovani Kusumah, Pranata Keuangan APBN Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Tengah
30.	Alfira Farrez Syihab, Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
31.	Ovi Luciansari, Pengadministrasi Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Timur
32.	Ignasia Melly Kusuma, Pranata Keuangan APBN Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Tengah
33.	Alifia Putri Amasya, Pranata Keuangan APBN Terampil pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
34.	Enoh Suparno Staf Administrasi Umum pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemen PPPA	Anggota	Wilayah Indonesia Barat
35.	Dony Suryatmo Priyandono, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota	Nasional
36.	Dorlan Festiana, Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota	Nasional



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KOORDINASI
37.	Adi Fahmi, Pelaksana pada Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota	Nasional
38.	Yosi Diani Tresna, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota	Nasional
39.	Ervan Arumansyah, Koordinator Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas	Anggota	Nasional
40.	Sri Utami, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Nasional
41.	Randy Saputra, Analis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Nasional

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 